

Religion, Political Contestation and Democracy: Kiai's Role as a Vote Broker in Madurese Local Political Battle

Asmawati*
Universitas Brawijaya
Malang, Indonesia
asmawati.suwarno@gmail.com

Towar Ikbal Tawakkal
Universitas Brawijaya
Malang, Indonesia
george.ikbal@ub.ac.id

Sholih Muadi
Universitas Brawijaya
Malang, Indonesia
dr.sholihmuadi@gmail.com

Abstract

This study aimed to know how the kiai as religious figures who had the highest social status in Pamekasan Regency carried out their work as vote brokers. This study was a qualitative research with a case study method. The research depended on verbal data and information of vote raising done by public figures in a Madurese local election. Intensive interview with some kiai as the key informants was done to get the intended information. They were chosen primary data sources because they were public religious figures whom the people adhere. The result showed that kiai with their social capital as vote brokers mobilizing the masses properly attracted political bosses who competed in the local election. Kiai with their religiosity played as an intermediary in delivering material for intended voters. However, it was unethical when the kiai as a religious figure provided material for voters. As a local figure who has a good image in a community, kiai became a major element in the progress of the democratic process. It can be concluded that the kiai as a highly respected religious figure contributed the democracy to be well organized in the future.

Keywords: *democracy; kiai; religiosity; votebroker*

*Corresponding Author

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana kiai sebagai tokoh religius yang memiliki status sosial tertinggi di Kabupaten Pamekasan menjalankan kiprahnya sebagai makelar suara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yang dapat memberikan nilai tambah pada pengetahuan secara unik terkait makelar suara yang diperankan oleh tokoh agama. Penelitian ini bertumpu pada informasi atau data verbal atau informasi mengenai penggalangan suara yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam Pilkada Madura. Wawancara intensif dengan beberapa kiai sebagai informan kunci dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Mereka dipilih sebagai sumber data primer karena mereka adalah tokoh agama yang menjadi panutan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kiai dengan modal sosial sebagai makelar suara yang mampu mobilisasi massa cukup menarik perhatian para bos politik yang berlaga di Pilkada. Kiai dengan religiusitasnya berperan sebagai perantara dalam penyampaian materi kepada pemilih yang dituju. Namun, hal tersebut dianggap tidak etis bila kiai sebagai tokoh agama memberikan materi bagi pemilih. Sebagai tokoh lokal yang memiliki citra baik di tengah masyarakat, kiai menjadi salah satu elemen utama dalam kemajuan proses demokrasi. Dapat disimpulkan bahwa kiai sebagai tokoh agama yang sangat disegani turut andil dalam menata demokrasi dengan baik di masa mendatang.

Kata Kunci : demokrasi; kiai; makelar suara; religiusitas

المخلص

و تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن كيفية قيام *Kiai* كشخصيات دينية لها أعلى مكانة اجتماعية في باميكاسان بعملهم كوسيط صوت المنتخبين. و هذا البحث بحث كفي مع طريقة دراسة الحالة التي يمكن أن توفر قيمة مضافة للمعرفة الفريدة المتعلقة بوسطاء صوت المنتخبين الذين تقومهم الشخصيات الخاصة للدينية. أما نتيجة هذا البحث فهي أن *kiai* برأسماله الاجتماعي قادرين على جذب الرؤساء السياسيين الذين سيتنافسون كوسيط صوت المنتخبين من أجل تعبئة الجماهير بشكل صحيح. كان *Kiai* مع تدينه يحتاج إلى وسيط يتم استخدامه كوسيط في تقديم النقود المخصصة للناخبين الذين يعتبرون أنه من غير الأخلاقي عندما يوفر كياي كشخصية دينية النقود للمنتخبين. و كان دور الكياي كشخصية محلية تتمتع بصورة جيدة في المجتمع من وجوده عنصرًا رئيسيًا في تقدم العملية الديمقراطية. و يستنتج الباحث أن *Kiai* كشخصية دينية يحظى باحترام كبير كوسيط الديمقراطية حتى صارت الديمقراطية شكلا جيدا في المستقبل.

الكلمات الرئيسية: *Kiai* ؛ التدين؛ وسيط الصوت؛ الديمقراطية

PENDAHULUAN

Urgensi keberadaan broker yang berperan sebagai mesin politik bagi para kandidat menjadi sangat diperhitungkan keberadaannya. Literatur yang menjelaskan akan pentingnya keberadaan broker baik di Indonesia maupun negara-negara lain menggambarkan secara jelas bahwa broker menjadi satu komponen pembantu kandidat menuju kancah politik kekuasaan. Salah satunya kemenangan partai di Argentina yang bergantung sepenuhnya pada jaringan broker untuk bertarung di arena politik (Rodrigo Zarazaga, 2014). Broker juga menjadi figur sentral dalam jejaring sosial dan politik karena memiliki keahlian dalam mengenal para pemilih (Ravanilla et al., 2017). Lebih jauh lagi peran broker harus mampu berupaya memastikan para pemilih akan cenderung tetap memilihnya mengingat bahwa pemilihan suara bersifat rahasia (Larreguy et al., 2016). Tidak heran ketika seorang kandidat akan mencalonkan diri menjadi pemimpin maka hal multak yang harus dibangun dari awal adalah menyiapkan tim sukses atau broker yang dapat mengantarkannya menuju kursi kekuasaan.

Sebagai figur utama yang menempati status sosial tertinggi di Kabupaten Pamekasan, kiai menempati tahta tertinggi yang keberadaannya sebagai tokoh lokal mampu membimbing dan memberikan ilmu agama untuk masyarakatnya guna memiliki sikap religius. Kiai merupakan sosok pemimpin agama yang dengan pesantrennya telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin non formal dalam masyarakat Indonesia. Pengaruh seorang kiai sangat tergantung kepada tinggi ilmu serta wibawa yang dimilikinya. Hal ini seringkali ditandai oleh kebesaran dan kemajuan pesantren yang dimilikinya (Sholichin, 2012). Tidak heran jika banyaknya pesantren, institut tinggi Islam dan lain sebagainya menjadikan kiai memiliki panggung yang berpengaruh bagi banyak orang. Tak terbatas pada persoalan ilmu agama, masyarakat masih mempercayai kiai sebagai tempat untuk mencurahkan segala masalah misalnya urusan jodoh, pengobatan, rezeki dan lain sebagainya. Tidak heran jika kiai di Madura khususnya Kabupaten Pamekasan kedudukannya melampaui batas pengaruh institusi-institusi kepemimpinan termasuk dalam kepemimpinan birokrasi pemerintahan (Zainuddin, 2014).

Keberadaan kiai yang sangat berpengaruh bagi masyarakat di Kabupaten Pamekasan menjadi mekanisme yang menjadikan hubungan masyarakat dan kiai patron-klien atau bisa disebut hubungan atas bawah (Zainuddin, 2014). Dengan demikian masyarakat menjadi mudah digerakkan oleh kiai. Hal inilah yang menjadi modal awal kiai dalam berpolitik. Dengan pengaruh basis massa yang besar dan sangat mudah dipengaruhi tidak heran jika keberadaan kiai sering dicari untuk menjadi makelar suara. Ditambah citra positif yang ada pada diri kiai menjadikan nilai jual yang tinggi untuk masyarakat mengikuti apa yang telah diperintahkan. Inilah yang menjadi pertimbangan baik bagi para kandidat memanfaatkan sosok kiai. Tidak jarang pula dengan basis massa yang dimiliki menjadikan kiai terjun mencalonkan diri menjadi pemimpin dalam pemerintahan formal. Salah satu contohnya adalah Kiai Ramdan Siraj di Sumenep yang mencalonkan diri menjadi bupati (Review & Asia, 2009).

Sepanjang banyak pengalaman yang dilakukan oleh kiai dalam memenangkan kandidat tentu tidak lepas dari problematika yang keberadaannya akan dibenturkan dengan religiusitas dan demokrasi. Sebagai pemimpin atau tokoh yang disegani tentu menjadi hal mutlak bagi kiai mempertahankan status sosialnya. Oleh sebab itu, alasan atas peran kiai dalam proses politik tidak terbatas pada imbalan finansial semata. Terlepas dari hal itu, jauh lebih mendasarkan pada penataan demokrasi menuju ke arah yang lebih baik yang dibutuhkannya orang baik dalam sebuah komunitas untuk menggiring preferensi pemilih.

Literasi terdahulu telah banyak membahas terkait makelar suara yang terfokus pada kriteria broker menjadi makelar suara yang dipilih oleh kandidat ditunjukkan oleh Towar et

al. (2017), Rodrigo Zarazaga (2014), Aspinall (2014) dan Ravanilla et al. (2017). Towar et al. (2017) dalam penelitiannya menjelaskan begitu penting memilih broker dengan reputasi baik dalam sebuah komunitas. Reputasi baik yang dimiliki seorang makelar suara mampu menjadi mekanisme yang dipercayai masyarakat dengan segala janji yang telah diucapkan ketika sedang melakukan kampanye. Rodrigo Zarazaga (2014) dalam *working paper*-nya menjelaskan bahwa pemilih akan cenderung memilih broker dengan reputasi yang baik dan mampu diandalkan dalam keuntungan di masa yang akan datang, dengan demikian pendukung akan memberikan loyalitasnya tanpa batas. Aspinall (2014) dalam penelitiannya terkait perilaku broker mengatakan bahwa pengkhianatan akan sangat besar kemungkinannya dilakukan mengingat tidak adanya kontrak politik yang mengikat serta broker cenderung berkhianat pada kandidat ketika kandidat mulai habis sumber dayanya. Dengan demikian broker dengan reputasi baik diperlukan. Ravanilla et al. (2017) menjelaskan bagaimana efektifitas broker dalam bekerja dengan berbagai macam hal yang dimiliki yaitu mampu mengukur preferensi sosial, mampu mengenali pemilih dan mampu membangun jejaring sosial.

Literasi terkait kiai sebagai tokoh lokal juga sangat banyak dilakukan oleh ilmuwan sosial, diantaranya adalah Zamroni (2012), Kosim (2012), Hannan et al. (2018) dan Review & Asia (2009). Zamroni (2012) dalam penelitiannya menjelaskan keberadaan kiai sebagai elite sosiokultural yang berkaitan dengan praktek keislaman. Tidak hanya terbatas pada kekuasaan kultural, para kiai juga banyak ditemukan keberadaannya sebagai kekuatan struktural yang memiliki jabatan sebagai DPRD ataupun Bupati. Kosim (2012) menjelaskan secara historis bagaimana kiai telah lama menjalankan politik praktis yaitu sejak zaman penjajah, era revolusi kemerdekaan, orde lama, orde baru hingga era reformasi saat ini. Hannan et al. (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bagaimana simbol keagamaan digunakan oleh kiai. Review & Asia (2009) menjelaskan kiprah kiai sebagai bupati salah satunya di Sumenep yaitu Ramdan Siraj yang memenangkan kontestasi pemilihan bupati.

Secara empiris hasil penelitian menggambarkan beberapa literatur yang ada dalam beberapa cara. Pertama, menerapkan literasi yang menjelaskan efektifitas makelar suara sebagai pedoman bagi peneliti menjelaskan bagaimana kiprah kiai sebagai makelar suara. Kedua, melengkapi literatur yang ada terkait kiprah kiai dalam dunia politik dengan memasukkan elemen dan penjelasan baru bagaimana kiai mampu bertahan dalam kiprahnya sebagai religiusitas dan dunia politik pemakelaran suara yang bersifat ilegal di Indonesia.

Hasil penelitian kami konsisten dengan beberapa hal diantaranya pentingnya pemilihan broker dengan reputasi baik yang ada dalam sebuah komunitas yang mampu mempertahankan konsisten suara yang telah didapatkan. Kiai sebagai sosok religiusitas yang tinggi di mata masyarakat menjadi modal sosial bagi kiai dalam menggerakkan banyak massa baik untuk mendukungnya sebagai figur politik ataupun sebagai makelar suara yang memenangkan bos politik mereka. Kami perlu mencatat bahwa hasil penelitian kami bukan lah satu-satunya yang menjelaskan kiprah kiai dalam dunia politik. Namun, kami membuka jalan baru dan mengisi kekosongan literatur sebelumnya dengan menjelaskan bagaimana kiai bertindak dalam dunia politik pemakelaran suara yang ilegal di Indonesia.

METODE

Artikel ini disusun berdasarkan pada penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Peneliti menggali informasi sedalam-dalamnya terkait lingkup makelar suara yang diperankan oleh tokoh lokal. Kabupaten Pamekasan dipilih oleh peneliti, karena kiprah kiai menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yang mayoritas berpenduduk muslim. Di kabupaten Pamekasan dibuktikan dengan banyaknya keberadaan pesantren dan

sekolah-sekolah yang berbasis muslim dengan demikian keberadaan kiai menjadi sentral dalam kehidupan masyarakat. Mengingat aktifitas makelar suara di Indonesia adalah ilegal maka peneliti sedikit kesulitan dalam mencari informasi. Kiai sangat sensitif jika harus melakukan pembahasan yang berkaitan dengan politik. Dengan demikian peneliti memanfaatkan koneksi lama yang terjalin dengan akademisi kabupaten Pamekasan yang sering melakukan studi terkait politik di Madura yang diperankan oleh tokoh lokal. Akademisi yang peneliti wawancara berjumlah 3 orang terkait lingkup kiai dalam dunia politik di kabupaten Pamekasan. Tidak terbatas pada hal itu, peneliti juga memanfaatkan wartawan yang bergelut dan mencari informasi terkait peta politik kabupaten Pamekasan. Wartawan yang peneliti wawancara berjumlah 8 orang terkait kiai dalam dunia politik ketika para wartawan meliput kegiatan pemilihan kepala daerah. Peneliti juga melakukan wawancara dengan partai yang memanfaatkan tokoh kiai dalam proses pencalonan serta 2 kandidat yang memanfaatkan peran kiai dalam kemenangannya menduduki kursi pemerintahan. Peneliti juga melakukan wawancara secara informal dengan para tokoh masyarakat dan masyarakat biasa pada umumnya untuk menambah informasi yang diperlukan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkisar pada aktivitas kiai dalam memobilisasi massa dan kelebihan kiai yang berperan sebagai makelar suara. Selain melakukan validasi informasi melalui wawancara mendalam antarinforman, informasi-informasi tersebut kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

PEMBAHASAN

Artikel terbagi dalam beberapa pembahasan. Pertama, modal sosial kiai. Pembahasan ini diperlukan untuk memperjelas posisi kiai sebagai magnet yang mampu menarik kandidat menggunakan jasanya sebagai makelar suara. Kedua, efektivitas kiai sebagai makelar suara, merujuk pada cara kerja kiai berperan sebagai makelar suara dalam mobilisasi massa. Ketiga, pembentukan argumen dengan mendiskusikan data-data dan literatur yang sudah ada. Pada bagian ini akan menjawab bagaimana kiai berperan untuk demokrasi serta rekayasa melawan politik uang yang dimainkan oleh kiai. Artikel ini diakhiri dengan penyimpulan argumen tentang agama, kontestasi politik dan demokrasi yang diperankan oleh kiai.

Modal Sosial Kiai

Pamekasan sebagai bagian dari Kabupaten di Madura yang memiliki julukan gerbang salam menjadikan masyarakatnya berada pada tatanan kehidupan sosial yang sarat dengan religiusitas. Bahkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman (2009) menjelaskan bagaimana etnis Madura ditentukan oleh identitas kesertaan Islam yang artinya jika orang yang tidak memeluk agama Islam maka secara otomatis dia akan keluar dari etnik Madura. Dengan demikian penyempurnaan agama dipercayai masyarakat dengan adanya kharisma kiai yang diimbangi dengan ilmu agama yang tinggi sebagai penuntun masyarakat dalam memeluk agama Islam. Kiai dalam sosoknya dikenal dengan spiritual yang tinggi dengan latar belakang kedekatan dengan Tuhan. Kiai juga merupakan seseorang yang memiliki status sosial tinggi yang sosoknya merepresentasikan puncak spiritual tertinggi dengan alasan kiai mengetahui kekuasaan dan keagungan Tuhan. Tidak heran jika kiai berada di tatanan tertinggi dibandingkan masyarakat biasa bahkan kepemimpinan administratif sekalipun. Rozaky Abdur (2004) menggambarkan kondisi masyarakat Kabupaten

Pamekasan dengan slogan yang dianut oleh penduduk lokal yaitu *bhuppa` bhappu` ghuru rato* yang memiliki arti bapak, ibu, guru dan pemerintah. Slogan tersebut dapat dijelaskan sebagai struktur hierarki penghormatan masyarakat Madura.

Sebagai tokoh lokal yang dikenal dengan sikap religiusitas yang tinggi dan menduduki tingkat pertama sebagai orang yang disegani di Madura khususnya Kabupaten Pamekasan, kiai memiliki status sosial yang berbeda dari masyarakat lainnya. Begitu tinggi kehormatan kiai di kalangan masyarakat Madura khususnya Pamekasan yang memandang kiai lebih hormat dibandingkan dengan penghormatan kepada kedua orang tua mereka. Hal ini muncul berdasarkan alasan bahwa menghormati dan berbuat baik kepada orang alim maka akan mendapat barakah dari Allah (Syarif, 2016). Dengan demikian apapun yang diperintahkan dan dikatakan kiai tidak akan mendapat bantahan dari masyarakat mengingat apa yang telah menjadi pegangan hidup mereka untuk selalu berbuat baik kepada kiai yang telah memberikan bimbingan dunia dan akhirat bagi mereka. Tidak heran jika kiai kedudukannya melampaui batas pengaruh institusi-institusi kepemimpinan, termasuk dalam kepemimpinan birokrasi pemerintahan (Zainuddin, 2014). Kiprah kiai juga dijelaskan bagaimana keberadaannya mampu memberikan pengaruh bagi masyarakat. Derani (2013) menjelaskan bagaimana sosok religiunitas yaitu ulama di betawi juga mampu menekan angka penambahan jumlah penduduk dengan program KB dimana pemerintah tidak mampu menjalankan program tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan ucapan Sofi`i (personal communication, 2020) selaku masyarakat Kabupaten Pamekasan menyatakan bahwa:

“minangkah kiyae se makon pastenah masyarakat tak kerah nolak. Sanajjen jieh bertentangan moso pamerenta paggun bhekal kauleh sadjedeh lakonih. Tapeh, kiyae tak toman nyoro se tak bhegus kaangghuy masyarakatdeh. Deddih kauleh sadjedeh partajeh mon kiyae mampu abingbing kauleh sadhejeh. Amatoen kiyae kaktintoh sal sittong buktenah kauleh sadhejeh”

“Kalau pak kiai menyuruh pasti masyarakat tidak mungkin menolak, meskipun itu bertentangan dengan pemerintah pasti akan kami lakukan. Tapi kiai tidak pernah menyuruh yang tidak baik untuk masyarakatnya. Jadi kami percaya bahwa kiai mampu membimbing kami. Mematuhi kiai adalah salah satu bakti kami.”

Pengaruh kiai diakui dan dianut oleh masyarakat dengan mematuhi segala perintahnya. Masyarakat akan berfikir bahwa apa yang diperintahkan oleh kiai tidak mungkin sebuah kesalahan, karena kiai memiliki ilmu yang tinggi dalam persoalan agama yang mampu menunjukkan jalan bagi masyarakatnya baik dunia dan akhirat. Hal ini diperkuat dengan pengakuan Taufiq (personal communication, 2020) selaku masyarakat Kabupaten Pamekasan yang menyatakan bahwa:

“masak rappah mak kaeh nyoro engkok so been kabbhi kaangghuy ngalakonih bhereng se tak bhegus. Jieh hal se mostahel. Buktenah bheih mak kaeh maloloh aberik engkok so been kabbhi arahan kaangghuy manot dhek pangeran. Apapoleh mak kaeh ebekalleh elmoh se tegghik se tak bisah eremeaghi. Deddih apahbeih parentanah pagghun engkok so been kabbhi lakonih saghennebbeh ateh”

“Bagaimana mungkin kiai menyuruh kami untuk melakukan hal yang tidak baik. Itu sangat tidak mungkin. Buktinya saja kiai selalu memberikan kami arahan untuk selalu taat kepada Tuhan. Apalagi kiai dibekali ilmu yang tinggi yang tidak bisa diremehkan. Jadi apapun perintahnya akan kami lakukan dengan sepenuh hati.”

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan kiai mampu menjadikan masyarakat taat dan patuh pada segala perintah yang diarahkan. Hal tersebut dilatar-belakangi oleh kiai yang memiliki kelebihan dalam bidang keagamaan yang mampu membimbing masyarakat

menuju jalan baik yang menghubungkan manusia terhadap Tuhan yang maha kuasa. Bimbingan tersebut dinilai lebih berarti dari apa pun di mana tanpa sosok kiai maka tidak ada yang mampu memberikan nasihat-nasihat dan ilmu agama kepada masyarakat biasa.

Dalam bidang pendidikan keberadaan kiai sangat dominan yang tampak pada banyaknya pondok pesantren yang dimiliki. Pondok pesantren tersebut tentu memiliki basis santri yang sangat banyak mengingat kiprah kiai sangat berperan dalam mendidik agama sebagai tuntunan dunia dan akhirat. Menggerakkan santri untuk memilih pemimpin menjadi suatu hal yang mudah dan akan dipatuhi oleh para santrinya dengan alasan bahwa santri tidak mungkin melanggar apa yang telah kiai perintahkan. Ketika santri telah diperintah tentu akan menyampaikan kepada kedua orang tua dan keluarga untuk mematuhi arahan yang telah kiai perintahkan. Dengan demikian tidak heran jika kiai banyak didatangi bos politik ketika masa proses pencalonan mengingat basis massa yang dimiliki kiai sangat banyak. Terlebih lagi tidak sedikit kiai yang terjun langsung mencalonkan diri dalam pertarungan politik mengingat di mata masyarakat kiai juga sangat berperan serta basis massa yang banyak dijadikan jalan bagi kiai untuk kemenangan politik.

Kiai merupakan sosok pemimpin agama yang telah memberikan bukti terhadap eksistensi dirinya untuk memberikan manfaat pada banyak orang. Tingginya ilmu yang dimiliki dan kewibawaan memberikan pengaruh besar terhadap lingkungan dan masyarakatnya. Dengan demikian bukan menjadi hal yang berlebihan ketika masyarakat tidak mampu bersikap rasional ketika dihadapkan pada kekaguman sosok kiai yang menjadi mekanisme masyarakat mematuhi segala perintahnya.

Segala kelebihan yang dimiliki kiai berupa basis massa dari masyarakat yang banyak serta para santri yang menjadi anak didiknya menjadikan kelebihan bagi kiai di Kabupaten Pamekasan yang dapat diperhitungkan oleh para calon kandidat untuk memanfaatkan keberadaan kiai dalam mengantongi suara pemilih. Tidak heran ketika kandidat harus merekrut kiai sebagai tim sukses mereka mengingat salah satu hal yang harus terpenuhi dari broker adalah memiliki basis massa yang banyak untuk digerakkan serta memiliki pengaruh dalam lingkungan.

Efektivitas Kiai sebagai Makelar Suara

Makelar suara atau biasa disebut dengan broker dipekerjakan dengan alasan bahwa mereka mengenal dengan baik para pemilih (Stokes et al., 2013). Munculnya teori peran broker merupakan respon terhadap pemahaman bahwa peran utama broker adalah membeli suara dan memobilisasi massa (Abbiyyu, 2020). Telah banyak literasi dunia menyatakan bahwa mobilisasi massa tidak lagi terfokus pada partai politik. Menimbang keberadaan partai politik dinilai tidak efektif lagi dalam proses mobilisasi massa. Beberapa literasi menyatakan bahwa pemanfaatan tokoh non formal dalam proses mobilisasi massa lebih efektif. Hal ini yang memaksa para kandidat dalam mencalonkan diri sebagai pemimpin multak menjalin hubungan dengan orang-orang non-formal untuk mengantarkan mereka menuju kursi kekuasaan. Tak jarang para kandidat memanfaatkan orang-orang yang berada dalam sebuah komunitas untuk menggerakkan massa. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Tawakkal (2017) yang menyatakan bahwa tidak efektifnya partai politik dalam mobilisasi massa memaksa kandidat mencari sendiri mesin politik untuk mendukungnya dengan memanfaatkan calo atau biasa disebut dengan tim sukses.

Pemilihan broker dalam proses mobilisasi massa juga menjadi pembahasan menarik, antara lain adalah Rodrigo Zarazaga (2014) dalam *working paper*-nya menjelaskan bahwa kandidat akan memilih broker yang memiliki reputasi yang baik untuk mengirim sumber daya yang diperuntukkan kepada pemilih. Hal ini berkaitan dengan peta politik yang terjadi di Madura khususnya Kabupaten Pamekasan yang dalam kiprah politik kiai selalu menjadi rujukan bagi para politisi untuk menjabat sebagai pemimpin. Ini diperkuat dengan penelitian

dari Sahab et al. (2012) yang menjelaskan bagaimana pemilih sebagian besar memilih pemimpin berdasarkan fatwa kiai dan ulama. Keberadaan kiai sebagai jalan terang bagi para politisi karena kiprahnya di dalam masyarakat sangat dominan sehingga kiai dianggap sebagai jalan/petunjuk masyarakat dalam berpedoman kepada Allah. Hal ini tentu menjadikan kiai memiliki basis massa yang tinggi untuk mendukung para politisi menduduki kursi kekuasaan. Berbagai basis massa yang dapat digerakkan oleh kiai tidak hanya masyarakat yang ada di lingkungan secara umum, melainkan para santri yang menjadi muridnya di pesantren. Hal ini menjadi kekuatan bagi kiai dan diperhitungkan keberadaannya untuk menarik suara demi kemenangan calon pemimpin.

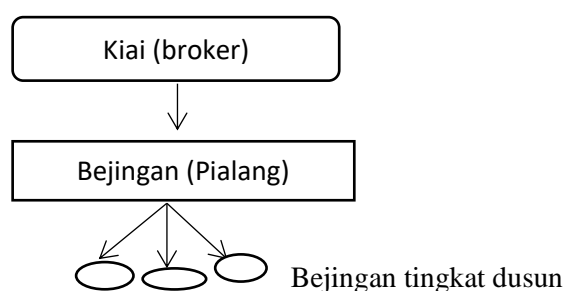
Reputasi baik pada kiai juga menjadi kelebihan yang bisa memunculkan perspektif baik dari kandidat mengingat bahwa aktifitas politik jual beli suara tanpa adanya kontrak tertulis yang dilatar-belakangi oleh ilegalnya aktifitas jual beli suara di Indonesia. Dengan demikian, pengkhianatan akan sangat mudah dilakukan oleh broker untuk memperkaya diri mereka sendiri. Hasil penelitian Aspinall (2014) menyatakan bahwa otonomi besar yang dimiliki broker melebihi kandidat akan memudahkan broker dalam memperkaya diri sendiri dengan tidak membagikan sumber daya yang diperuntukkan kepada pemilih. Bahkan tidak jarang broker akan beralih pada kandidat lawan ketika kandidat sudah mulai kehabisan sumber daya.

Perilaku kiai bekerja kepada kandidat menjadi perhatian penting. Ketika makelar suara dihadapkan pada situasi pengkhianatan yang dapat terjadi dengan berbagai latar belakang tidak menyampaikan materi yang diperuntukkan pada pemilih demi memperkaya dirinya dan timnya; atau pun melakukan pembelotan kepada kandidat lawan ketika kandidat lawan menawarkan intensif yang tinggi. Hal ini menjadi problematika yang tidak dapat dianggap sepele oleh kandidat. Apalagi keterlibatan makelar suara tidak dapat dituntut ketika melakukan pengkhianatan. Membuka kebusukan makelar suara sama saja mengantarkan kandidat pada proses hukum mengingat aktifitas makelar suara adalah ilegal. Namun, kiai dalam hal ini akan memberikan loyalitas penuh kepada kandidat yang telah dipegangnya. Mekanisme yang mendorong kiai melakukan kesetiaan kepada kandidat adalah status sosial yang dimiliki kiai tidak mungkin dihancurkan hanya karena persoalan materi. Sesuai dengan pendapat Towar et al. (2017) bahwa reputasi yang dimiliki orang baik dalam komunitas tidak akan dihancurkan sekalipun tawaran finansial sangat besar. Dengan demikian kandidat tidak akan khawatir atas pengkhianatan yang akan dilakukan oleh kiai.

Proses mobilisasi massa tentu membutuhkan berbagai aktor dengan segala pembagian peran dan tanggung jawab. Dalam prakteknya kiai tidak dapat berjalan sendirian. Sesuai dengan penelitian Tawakkal & Garner (2017) yang menyatakan bahwa kampanye politik merupakan operasi besar yang melibatkan banyak individu untuk dipekerjakan (biasanya di Indonesia disebut tim sukses). Dalam proses mencari suara tentu tugas kiai hanya menggerakkan massa untuk mendukung kandidat. Massa di sini terbagi ke dalam masyarakat biasa serta santri-santri yang menjadi muridnya. Mengingat bahwa makelar suara tidak lepas dari pemberian sumber daya yang diperuntukkan kepada pemilih maka kiai dengan basis agama dan religiusitas yang tinggi tentu tidak mungkin melakukan distribusi materi mengingat bahwa hal tersebut ilegal di Indonesia dan melanggar aturan pemilu yang bebas dari jual beli suara. Dengan demikian kiai tidak bisa berjalan sendiri, dibutuhkan pialang sebagai perantara untuk mengantarkan sumber daya kepada pemilih. Sebagai pialang tentu kiai juga tidak sembarang dalam memilih orang apalagi berkaitan dengan persoalan materi. Mengingat bahwa praktik ini bersifat ilegal dan tidak ada kontrak resmi untuk menuntut jika materi tidak tersampaikan maka pemilihan pialang yang tidak memiliki status sosial tinggi akan beresiko untuk berkhianat (Towar et al., 2017). Oleh karena itu, kiai memilih *bejangan* sebagai pialang mengingat *bejangan* memiliki status sosial tinggi di bawah kiai. *Bejangan*

juga memiliki harga diri yang dipertaruhkan. Ketika *bejangan* tidak mendistribusikan materi yang diperuntukkan kepada pemilih maka harga diri yang terletak pada jiwa *bejangan* dipertanyakan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Wati et al. (2020) yang menyatakan bahwa *bejangan* dengan status sosial yang dimiliki mempertaruhkan harga dirinya dalam proses mobilisasi massa. Dengan demikian keberadaan kiai dan *bejangan* menjadi satu frekuensi dengan tugas yang berbeda untuk satu tujuan yaitu kemenangan kandidat. Hal ini dibuktikan dengan kemenangan kandidat calon bupati di Bangkalan yang mampu menjadi pemenang ketika memanfaatkan tokoh kiai dan *bejangan* dalam proses mobilisasi massa (Abdurrahman, 2009).

Kerjasama antara kiai dan *bejangan* sebagai dua tokoh lokal yang memiliki status sosial yang tinggi menjadikan efektifitas suara yang didapatkan sangat tepat sesuai dengan perhitungan. Dengan demikian dibutuhkan struktur makelar suara guna menjalankan dan membagi tugas dengan baik dan terkoordinasi. Beberapa struktur yang bermain dalam hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Struktur makelar suara (data peneliti)

Hierarki struktur makelar suara pada Bagan 1 tersebut dapat menjelaskan bagaimana kiai bekerja sebagai makelar suara yang memiliki peran mencari pemilih untuk melabuhkan suaranya kepada kandidat yang dipegangnya. Peran ini dilakukan dengan mengakomodir masyarakat dan para santri untuk bersedia mendukung kandidatnya dalam sebuah pemilihan politik. Menimbang proses jual beli suara tidak jauh dari politik uang maka kiai juga memiliki andil yang penuh dalam memberikan materi yang diperuntukkan kepada pemilih yang diberikan secara langsung oleh kandidat. Namun, menimbang sosok kiai yang identik dengan sifat religiusitas akan sangat tidak etis ketika seorang kiai memberikan materi kepada pemilih. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan memanfaatkan tokoh *bejangan* yang memiliki status sosial yang tinggi pula di Kabupaten Pamekasan berada pada urutan kedua setelah kiai. Dengan demikian keberadaannya dimanfaatkan untuk membagi materi kepada calon pemilih mengingat sosok *bejangan* yang identik dengan jagoanisme bukan menjadi permasalahan ketika harus mendistribusikan materi kepada calon pemilih. *Bejangan* kelas kakap memanfaatkan *bejangan* yang tersebar di setiap dusun untuk memudahkan *bejangan* mendistribusikan materi kepada pemilih.

Hierarki struktural makelar suara telah banyak diteliti oleh ilmuwan dunia. Aspinall (2016) menyebutnya sebagai tim sukses dengan bentuk piramida. Lebih lengkap Aspinall (2014) menjelaskan bahwa dalam fungsi piramida tersebut terdapat beberapa pembagian tugas dan tujuan untuk memastikan preferensi pemilih baik tingkat komunitas dan individu, untuk menyampaikan informasi tentang kandidat kepada pemilih serta memberikan dan membagikan insentif materi dan uang tunai kepada pemilih. Tawakkal (2017) menjelaskan adanya jaringan dalam bentuk multi level dan terdapat koordinator yang menjadi puncak

struktur diikuti dengan tingkatan bawah yaitu RW dan RT. Setiap tingkatan memiliki tugas yang berbeda untuk memobilisasi pemilih. Melihat struktur hierarki makelar suara yang dimainkan oleh kiai dan *bejangan* dalam proses mobilisasi massa menjadi satu fenomena yang menunjukkan pentingnya terbentuknya struktur dalam proses mobilisasi massa demi terwujudnya kemenangan kandidat. Kedua unsur makelar suara dalam proses mobilisasi baik kiai ataupun *bejangan* menjadi modal kuat untuk menarik pemilih melabuhkan suaranya kepada bos politik mereka.

Kerjasama yang terjalin antara kiai dan *bejangan* menjadikan kekuatan yang mampu menunjukkan seberapa efektif peran kiai sebagai makelar suara. *Bejangan* dengan status sosial yang dimiliki serta jagoanisme dan harga diri yang dimiliki tidak mungkin mengkhianati kiai dan para pemilih untuk membelotkan materi yang telah diperuntukkan pada pemilih. Tidak hanya itu, ketika *bejangan* memilih untuk berkhianat kepada kiai akan berdampak pada kehidupannya, yakni *bejangan* akan malu kepada masyarakat karena tidak patuh terhadap perintah dari kiai. Bahkan lebih dari itu kinerja *bejangan* dengan sangat akurat membantu kiai dalam memastikan jumlah suara yang akan diperuntukkan pada bos politik mereka. Dengan demikian konsistensi jumlah suara akan terjaga hingga pemilihan tiba.

Dalam tatanan masyarakat yang diperintahkan oleh kiai menyangkut segala permasalahan tentu menjadi pantangan ketika dilanggar. Hal ini melengkapi pendapat Inan & Chechter (2012) bahwa mempertahankan pemilih harus berdasarkan hubungan timbal balik. Fakta yang terjadi di lapangan, hubungan timbal balik memang mutlak dijalankan oleh makelar suara dan calon pemilih demi mempertahankan loyalitas pemilih. Namun timbal balik berupa materi dan pemberian sumber daya tidak selalu menjadi kewajiban bagi kiai dan masyarakat mengingat bahwa bakti masyarakat kepada kiai yang telah memberikan bimbingan dunia dan akhirat tidak dapat ditukar dengan apapun. Tidak heran abdi masyarakat terhadap kiai begitu tinggi. Menjadi sangat tidak terhormat ketika kepatuhan pada kiai didasarkan pada imbalan finansial semata.

Kiai dan Demokrasi

Ketika kiai dihadapkan peranya sebagai makelar suara yang memobilisasi massa demi kemenangan bos politik yang mereka bantu tentu akan dihadapkan pada pelemahan sistem demokrasi. Pada praktek mobilisasi massa, penelitian Rijal (2014) menjelaskan bahwa kiai dituntut ikut andil dalam keterlibatan partai untuk kemenangan kandidat mereka. Diperkuat oleh Zamroni (2012) yang mengungkapkan bahwa pada kenyataannya memang kiai sampai saat ini masih mengandalkan loyalitas masyarakat Madura sebagai modal untuk melakukan *political bargaining*. Dengan demikian peran masyarakat akar rumput hanya menjadi bulan-bulanan para elite yang haus akan kekuasaan. Fakta ini memberikan simpulan bahwa keberadaan kiai akan dibenturkan dengan menciderai proses demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi yang sejatinya diwujudkan dalam proses pemilihan umum menjadi satu ajang yang memberikan kesempatan masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya malah seakan dikebiri dengan berbagai agenda politik yang penuh dengan kepentingan. Dengan adanya peran kiai yang ikut serta dalam proses politik dalam pemilihan pemimpin maka menjadikan masyarakat alat yang bisa diperdaya untuk memilih sesuai dengan apa yang diperintahkan bukan sesuai dengan keinginan dan hati nurani mereka.

Namun, jika kita kembali pada hukum fiqih siyâsah yang menjelaskan bagaimana mengatur, mengurus dan mengendalikan dan memperbaiki urusan negeri tentu akan memperoleh titik terang bagi sebuah demokrasi. Siyâsah memiliki awal yang merupakan suatu usaha atau ikhtiar untuk mencapai dan menyelesaikan sesuatu masalah. Hal ini bermaksud untuk mengatur suatu kepengurusan yang berkaitan dengan pemerintahan (Umar, 2018). Aliran ini memiliki peran yang dalam Islam sebenarnya tidak terdapat kekuasaan keagamaan melainkan hanya terbatas pada bagaimana memberikan peringatan

secara baik dan mengajak orang lain ke arah kebaikan (Rijal, 2014). Melihat fenomena belum mapannya demokrasi di Indonesia tentu harus ada peran-peran penting dari seseorang yang mampu menjadi perantara untuk kemajuan demokrasi kedepannya. Peran ini diisi oleh keberadaan kiai yang memiliki citra baik dalam sebuah komunitas utamanya agama untuk mengantarkan demokrasi ke arah yang lebih maju. Tidak dipungkiri bahwa proses ini akan dilakukan dengan berbagai benturan- benturan yang akan menghantam dalam perjalanannya. Namun, untuk mencapai hasil yang baik tentu dibutuhkan proses yang panjang pula untuk sampai pada kemapanan demokrasi.

Definisi kiai sebagai makelar suara adalah dua karakter, yakni “perilaku” dan “proses demokrasi”. Kedua karakter tersebut terjadi karena terdapat hubungan erat yang terjadi di antara keduanya. Perilaku kiai sebagai makelar suara ditunjukkan dengan sikap kesetiaan kiai kepada kandidat yang menjadi pertimbangan bagi kandidat untuk melakukan hubungan timbal balik dengan resiko pengkhianatan yang sangat sedikit. Hal tersebut tentu dengan landasan kuat bahwa kiai berada di lingkungan religius yang tidak mungkin melakukan pengkhianatan dengan mekanisme tekanan sosial yang melatarbelakangi. Sesuai dengan pendapat Towar et al. (2017) bahwa reputasi baik yang telah dibangun dalam sebuah komunitas menjadi mekanisme yang mampu menjadikan broker tetap setia kepada kandidat. Dengan demikian citra kiai akan tetap baik di mata bos politik yang akan menggunakan jasanya baik di masa yang akan datang.

Perilaku kiai dalam proses mobilisasi massa tentu tidak terbatas pada perilaku kesetiaan yang diperuntukkan kepada kandidat. Lebih dari itu kiai memiliki perilaku religiusitas yang bisa membawa dampak baik bagi dunia permakelaran suara yang diidentikkan dengan aktifitas ilegal baik di Indonesia maupun dunia. Ketika historikal partai politik yang tidak lagi efektif dalam proses mobilisasi massa tentu keberadaannya akan tergantikan oleh sosok informal yang keberadaannya lebih dipandang efektif. Transisi ini memiliki latar belakang alasan, seperti yang dijelaskan oleh Komito (1992) bagaimana figur non politik dimanfaatkan kandidat di Irlandia untuk mengetahui jejaring pemilih dengan sangat baik. Ravanilla et al. (2017) juga menjelaskan bagaimana tokoh non politik mampu memiliki jaringan sosial yang luas untuk menarik suara pemilih. Latar belakang inilah yang menjadi landasan bahwa penggunaan partai politik sebagai alat dalam mobilisasi massa sudah tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Oleh sebab itu dibutuhkannya tokoh non politik yang memiliki keahlian dan kelebihan di lingkungan masyarakat sebagai perantara untuk memilih pemimpin yang baik.

Sifat religiusitas kiai menjadi satu modal sosial dalam mewujudkan proses demokrasi menuju arah yang lebih baik. Kiai dengan latar belakang religiusitas yang menjadi tokoh yang mampu membimbing masyarakat tidak hanya di dunia namun juga akhirat menjadikan sosoknya tidak perlu diragukan. Situasi ini akan sedikit membantu dalam menangani demokrasi yang sarat dengan politik uang. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa politik uang akan terus ada ketika negara ini masih tahap berkembang. Bahkan Amerika membutuhkan banyak waktu menuju tatanan demokrasi maju. Menjadi celah harapan bagi negara Indonesia untuk bisa keluar dari proses demokrasi yang kotor. Cara yang bisa dimanfaatkan adalah dengan memanfaatkan tokoh lokal dengan pribadi yang memiliki panutan sebagai pembimbing masyarakat menentukan pilihan. Hal ini memperkuat pendapat Towar et al. (2017) bahwa orang baik dalam sebuah komunitas akan mempertaruhkan namanya ketika menjadi makelar suara bagi bos politik mereka. Dengan ini dapat dikatakan bahwa orang baik dalam sebuah komunitas bertindak sebagai orang yang mampu membawa pemimpin yang baik pula untuk lingkungan masyarakat di sekitarnya menimbang tanggung jawab yang akan dibawanya untuk kedepannya ketika bos politik mereka ingkar.

Politik lokal kiai di Kabupaten Pamekasan memberikan gambaran bahwa kiai mampu menjadi perantara dalam pemilihan pemimpin dengan memperhatikan kualitas kandidat yang nantinya akan dipromosikan pada masyarakat dan santri-santri mereka. Ketika kandidat yang diperuntukkan tidak sesuai tentu menjadi beban bagi kiai kepada masyarakat karena keberadaannya tidak mampu memberi manfaat pada lingkungannya. Secara otomatis, pemilihan berikutnya menjadi sedikit rumit akibat dari ketidakpercayaan pada kandidat sudah melekat pada diri kiai sebagai makelar suara dan masyarakat sebagai pemilih. Dengan demikian mau tidak mau kandidat harus memenuhi segala janji yang telah diperuntukkan kepada pemilihnya. Kiai dalam menjalankan perannya memilih kandidat mana yang akan dibantu untuk duduk dalam kursi pemerintahan menjadi tugas yang tidak mudah. Pasalnya, kiai harus benar-benar yakin pada kandidat yang akan diberikan bantuan untuk mendapatkan kemenangan akan mendatangkan keuntungan bagi lingkungannya. Hal ini dapat dipastikan dengan melihat semua program dan agenda yang akan dilakukan oleh kandidat ketika menjabat. Hal ini menjadi satu langkah ke depan dengan perantara kiai mampu meyakinkan masyarakat bahwa tidak akan salah memilih pemimpin.

Sebagai makelar suara perilaku ini juga dimandatkan sebagai proses dari sebuah demokrasi. Ketika makelar suara dihadapkan pada politik uang yang menciderai demokrasi maka cara yang tepat adalah mencari solusi dari permasalahan yang tidak ada habisnya ini. Dengan gambaran perilaku kiai yang mengarah pada tindakan kebaikan maka menjadi jalan terang bahwa demokrasi mampu ditata secara perlahan. Demokrasi adalah sebuah proses yang untuk mencapainya tidak hanya membutuhkan waktu satu hari, lebih dari itu ratusan tahun dibutuhkan dengan segala syarat dan kemapanaan cara pandang masyarakat. Adanya sosok kiai mampu membimbing masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan lingkungan masyarakatnya.

Proses pembelian suara yang terjadi tentu memberikan dua input hasil yang dapat dianalisis yaitu hasil positif dan negatif. Menyoroti hasil negatif dari pembelian suara adalah kebanyakan politik lokal akan menyalahgunakan sumber daya yang diperuntukkan kepada publik guna mengganti kerugian yang dikeluarkan ketika kampanye. Sedangkan hasil positif yang didapatkan adalah keberadaan pembelian suara yang sebenarnya. Kennedy (2010) mengungkapkan bahwa pembelian suara adalah hasil dari pemilihan yang kompetitif yang tidak perlu solusi langsung untuk pembelian suara. Kedepannya praktek pembelian suara akan berkurang sedikit demi sedikit ketika dilakukan dengan sistem hukum yang lebih efisien dan dibarengi dengan pendidikan yang diperuntukkan pada pemilih. Dalam persoalan ini kiai mampu memberikan pendidikan dasar kepada pemilih bagaimana mencari pemimpin yang mampu berguna untuk negara. Tentu membutuhkan waktu yang cukup lama menimbang Amerika menjadi negara maju dan bebas dari proses pembelian suara butuh ratusan tahun. Sedangkan Indonesia masih berada pada tahap demokrasi yang tergolong muda. Dengan demikian keberadaan kiai mampu menjadi sosok yang mampu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat kedepannya.

Literasi seluruh dunia banyak membahas terkait proses makelar suara yang dapat menumbangkan demokrasi, diantaranya adalah Steinhorsdottir et al. (2007) yang menjelaskan bahwa hanya kandidat yang memiliki banyak uang yang akan memenangkan kompetisi politik, pemilih akan memilih kandidat dengan penawaran yang paling tinggi. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pembelian suara menyebarkan kekayaan dari menyuap pejabat tertentu untuk menjadi pemimpin desa. Namun hal ini terbantahkan dengan fenomena kiai dan masyarakat di Kabupaten Pamekasan bahwa tidak ada fenomena yang menjelaskan bagaimana antara keduanya terdapat penawaran harga tertinggi dalam mendukung bos politik mereka. Dengan demikian satu langkah dari pendidikan pemilih diterapkan secara tidak langsung oleh pemilih bahwa dengan memilih kandidat yang

memiliki sumber daya yang banyak akan memberikan imbas di masa mendatang yaitu penyalahgunaan jabatan dalam memperkaya diri sendiri. Sesuai dengan pendapat Li et al. (2007) yang menjelaskan bahwa pengendalian pembelian suara adalah dengan melakukan pendidikan bagi pemilih. Kennedy (2010) menjelaskan bagaimana fenomena pembelian suara di China mampu menjadi tahap awal yang menjadi harga dari sebuah demokrasi. Dengan demikian pembelian suara tidak dapat dianggap sebagai penghambat reformasi mengingat pemilihan kompetitif kedepannya memaksa para pejabat pemerintah melarang pembelian suara.

Namun, pada prinsipnya memang pemilu di Indonesia yang terjalin antara kandidat dan pemilih adalah pertukaran surat suara dan sumber daya, maka hal tersebut tidak dapat dikesampingkan. Mengingat Indonesia dalam menata demokrasi masih membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mewujudkan kemapanan demokrasi. Dengan demikian memanfaatkan sosok kiai dalam proses mobilisasi massa sedikitnya mampu menjadi satu tahap bagi kita menuju arah demokrasi yang baik. Kennedy (2010) dalam penelitiannya mengungkapkan pemilihan di China menggambarkan bahwa pembagian uang dalam proses pemilu merupakan tahap yang dapat menjelaskan proses dari harga demokrasi untuk menuju kemapanan demokrasi.

Rekayasa Reformasi Melawan Politik Uang

Debat ilmiah yang sering muncul bahwa demokrasi mampu berdiri tegak tanpa adanya *money politic* dalam pemilihan pemimpin sering memunculkan spekulasi yang beragam. Sementara dokumen-dokumen yang tergambar dalam pemilihan politik masih sarat dengan pertukaran materi baik uang maupun barang. Pembelian suara baik berupa uang tunai maupun barang yang dipertukarkan di masa pemilihan menjadi agenda yang tidak bisa dihentikan meskipun kegiatan dan segala praktek *money politic* telah dilarang dalam proses pemilihan umum. Fenomena di Kabupaten Pamekasan memberikan gambaran harga suara yang sangat tinggi apalagi dalam pemilihan kepala desa atau bupati. Harga setiap suara bisa mencapai Rp.1.000.000 bahkan bisa lebih ketika pemilihan suara mulai dekat. Hal ini dilatar belakangi oleh panasnya persaingan politik yang terjadi di Kabupaten Pamekasan. Bukan hanya kandidat yang menjadi penting atas hasil dari kontestasi politik. Makelar suara yang berperan sebagai mobilisasi massa juga mempertaruhkan nama, harga diri dan kewibawaannya dari hasil kemenangan kandidat. Tidak heran ketika pemilihan berlangsung permainan besaran uang juga menjadi penentu kemenangan kandidat. Fenomena ini tentu akan sangat sulit ketika harus membangkitkan kesadaran masyarakat atas permasalahan terhadap politik uang.

Kepentingan dari masing-masing individu baik dari kandidat, makelar suara maupun pemilih juga menjadi latar belakang yang berpengaruh dalam proses politik uang. Kandidat dengan kepentingannya ingin menjadi pemimpin akan melakukan segala cara untuk menang sekalipun cara yang ditempuh tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kandidat tidak segan memberikan materi baik kepada makelar suara yang akan menjadi perantara untuk mencari calon pemilih serta untuk para pemilih yang akan melabuhkan suaranya kepada kandidat. Hal ini merupakan cara yang efektif sehingga masyarakat sangat mudah sekali memberikan hak suaranya hanya dengan pertukaran materi. Makelar suara dalam hal ini juga ingin mendapatkan keuntungan materi yang akan didapatkan dari kandidat jika ia mampu memenangkan kontestasi. Hal inilah yang menjadi alasan makelar suara berlomba-lomba mencari suara dengan memberikan imbalan materi kepada pemilihnya. Dari para pemilih juga memanfaatkan fenomena pemilihan umum sebagai pesta yang identik dengan bagi-bagi uang. Menjadi tradisi yang selalu diingat oleh pemilih ketika pemilihan umum akan banyak keuntungan yang akan mereka dapatkan utamanya imbalan materi. Dengan segala kepentingan inilah yang menjadikan politik uang sangat sulit dihilangkan.

Permasalahan politik uang inilah akan menjadi satu hambatan dalam Kemajuan demokrasi perlu dipahami sebagai suatu proses yang tidak mudah. Ketika negara masih menata demokrasi dengan baik tentu dibutuhkan proses yang teramat panjang. Menurut Hellmann (2014) dalam penelitiannya menjelaskan proyek rekayasa yang dapat dilakukan menuju kemajuan demokrasi agar terlepas dari politik uang adalah dengan mendorong reformasi terhadap kebutuhan yang dirasakan. Dimulai dari lingkup kecil di Kabupaten Pamekasan yang mayoritas memiliki rasa religiusitas tinggi serta tidak mampu melepaskan Islam dari keseharian dan peran kiai dalam mengambil keputusan tentu menjadi satu mekanisme yang dapat mendorong keberadaan kiai mampu memberi jalan terang bagi demokrasi. Kiprahnya sebagai makelar suara kiai mampu memberikan dan menunjukkan pemimpin yang baik untuk masyarakatnya. Peran Kiai dalam hal ini tentu banyak mempertimbangkan kandidat mana yang mampu memberi manfaat kepada masyarakat sekitar ketika menjadi pemimpin. Dengan demikian kiai tidak akan menanggung malu ketika harus berhadapan dengan masyarakat ketika kandidat yang diusungnya mampu memenuhi segala aspirasi masyarakat. Jika kandidat yang telah diusung oleh kiai mengkhianati janji dan kesepakatan yang telah dibuat maka untuk pemilihan berikutnya akan sulit bagi kandidat untuk duduk di kursi pemerintahan.

Pada studi terkait makelar suara tentu terdapat hubungan timbal balik antara pemilih dan makelar suara. Namun, menjadi hal yang baik ketika hubungan timbal balik mampu memberikan manfaat yang panjang bagi pemilihnya. Politik uang dan pertukaran materi adalah hubungan jangka pendek yang tidak menghasilkan apapun di masa depan kecuali penyesalan akibat kandidat tidak mampu memenuhi janji yang telah dilontarkan ketika kampanye. Hal tersebut sangat wajar terjadi sehingga pertukaran materi jangka pendek dianggap kandidat sebagai imbalan yang sesuai dari suara yang telah diberikan oleh pemilih. Dengan demikian kandidat ketika memimpin akan cuci tangan ketika ada janji yang belum terlaksana. Hal ini juga menimbulkan tingginya korupsi di daerah seperti yang diungkapkan oleh Cox (2015) bahwa hukum tidak dapat meminimalisir korupsi dalam kasus yang disebabkan oleh pembelian suara. Gambaran ini muncul sebagai imbas dari pertukaran materi jangka pendek sehingga kandidat dengan segala cara mengembalikan uang yang telah diberikannya kepada pemilih. Hal yang sangat mudah dilakukan adalah dengan melakukan korupsi. Hal ini menjadi sangat wajar ketika media banyak memberitakan pemimpin daerah yang banyak tertangkap akibat dari korupsi. Ketika kandidat melakukan korupsi maka segala janji-janji yang semestinya dibuktikan di masa kepemimpinannya tidak dapat terealisasi. Akibatnya, masyarakat tidak menerima manfaat apapun dari kandidat yang mereka dukung saat pemilihan umum. Dalam hal ini memunculkan anggapan dari kandidat bahwa mereka tidak peduli dengan janji yang sudah mereka ucapkan saat masa kampanye. Faktanya kandidat dan pemilih sudah melakukan transaksi atau hubungan timbal balik berupa pertukaran materi yang dinilai mampu membeli suara dan loyalitas para pemilih. Dengan demikian, ketika menjabat mereka akan cuci tangan dengan tanggung jawab mereka.

Berbeda ketika dihadapkan pada timbal balik jangka panjang, kiai memiliki andil besar dalam mewujudkan peran ini. Kiai dengan segala kelebihan yang dimiliki mampu memberikan masyarakat timbal balik yang bermanfaat. Kiai dengan segala peran dan perintahnya mampu menghipnotis masyarakat untuk patuh terhadap arahannya. Tidak hanya demi keuntungan kiai dan kandidat atas kesepakatan dari kedua belah pihak lakukan. Lebih dari itu masyarakat membutuhkan pendidikan politik menuju demokrasi yang didasarkan pada kesadaran masyarakat. Dalam hal ini tidak hanya terbatas pada keuntungan pada timbal balik materi. Lebih dari itu masyarakat akan mendapatkan kewibawaannya sebagai bagian yang membangun demokrasi menuju ke arah yang lebih baik. Temuan peneliti sedikit mengejutkan ketika fenomena di lapangan menjelaskan bahwa keadaan masyarakat yang

mampu sepenuhnya tunduk dan patuh terhadap perintah kiai tanpa adanya timbal balik materi menjadi satu landasan penting yang perlu diperdalam menuju ke arah kesadaran masyarakat terhadap *money politic*.

Ketika dalam elemen-elemen antara kandidat, makelar suara dan pemilih mampu berkolaborasi dengan baik maka keuntungan yang akan didapatkan adalah kemapanan demokrasi. Masyarakat akan sadar bahwa yang dibutuhkan bukan hanya pemberian materi jangka pendek, melainkan manfaat jangka panjang yang bisa dirasakan misalnya terwujudnya segala program pembangunan dan lain sebagainya. Pertukaran antara makelar suara dan pemilih yang mampu mendatangkan manfaat jangka panjang secara perlahan akan memberikan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat kedepannya atas ruginya *money politic* yang telah mereka terima selama ini.

KESIMPULAN

Makelar suara menjadi rujukan penting bagi kandidat ketika akan mencalonkan diri sebagai pemimpin dalam perebutan kekuasaan. Pemilihan makelar suara juga harus dibarengi dengan seberapa besar dampak yang ditimbulkan makelar suara dalam memobilisasi massa. Modal sosial yang dimiliki oleh Kiai menjadikan keberadaannya diperhitungkan bagi kandidat yang akan bertarung dalam kontes politik. Banyaknya basis massa yang dimiliki oleh kiai serta ketaatan masyarakat terhadap perintah kiai menjadikan kelebihan yang dipertimbangkan oleh kandidat sebagai makelar suara yang bertugas dalam mobilisasi massa. Mengingat terbenturnya sifat religiusitas yang dimiliki oleh kiai dan aktifitas makelar suara yang bersifat ilegal memaksa kiai tidak etis ketika menyampaikan sumber daya yang diperuntukkan kepada pemilih. Keberadaan *bejangan* menjadi perantara kiai sebagai pialang yang dapat menjembatani antara pemilih dan kandidat dalam penyampaian sumber daya. Hal mengejutkan terjadi ketika religiusitas dibenturkan dengan rusaknya demokrasi sebagai imbas dari pertukaran suara dengan materi maka keberadaan kiai sebagai pendidikan politik yang dapat mengubah jalan demokrasi kita menuju arah yang lebih baik.

Beberapa temuan yang telah didapatkan oleh peneliti mampu membantu menjelaskan mengapa keberadaan sosok orang baik sebagai makelar suara mampu mengarahkan pada loyalitas pemilih yang konsisten serta kemajuan demokrasi secara perlahan. Hal ini dibuktikan dengan rekayasa politik uang yang akan diminimalisir kedepannya mengingat keberadaan makelar suara yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar dengan tidak terbatas pada jumlah materi melainkan manfaat jangka panjang.

Masih begitu banyak pertanyaan yang harus dijelajahi. Menimbang bahwa kiai diperebutkan oleh banyak kandidat dalam proses mobilisasi massa hal mengejutkan menimbang tawaran yang diberikan pada kiai hingga memutuskan untuk membantu bos politik mereka. Maka penelitian lebih lanjut dibutuhkan.

REFERENSI

- Abbiyyu, M. D. (2020). Role of the Botoh as Political Brokers and Gamblers during the Tulungagung Local Election of 2018. *Jurnal Politik*, 6(1), 65. <https://doi.org/10.7454/jp.v6i1.284>
- Abdurrahman. (2009). Fenomena Kiai dalam Dinamika Politik: Antara Gerakan Moral dan Politik. *Karsa*, 15(1), 25–34.

- Aspinall, E. (2014). When Brokers Betray: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 46(4), 545–570. <https://doi.org/10.1080/14672715.2014.960706>
- Cox, G. W., Kousser, J. M., Cox, G. W., Kousser, J. M., Burn-, D., Burnham, D., & Converse, P. E. (2015). *Turnout and Rural Corruption: New York as a Test and*. 25(4), 646–663.
- Derani, S. (2013). Ulama Betawi dalam Perspektif Sejarah. *Buletin Al-Turas*, 19(2), 217–240.
- Edward Aspinall, M. S. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism*.
- Hannan, A., Sosiologi, M., Ilmu, F., & Politik, I. (2018). Agama, Kekerasan dan Kontestasi Politik Elektoral: Penggunaan Simbol Keagamaan Kiai dan Kekuasaan Blater Dalam Pertarungan Politik Lokal Madura. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(2), 187–222.
- Hellmann, O. (2014). Electoral reform in Asia: Institutional engineering against “money politics.” *Japanese Journal of Political Science*, 15(2), 275–298. <https://doi.org/10.1017/S1468109914000073>
- Inan, B. Y. F. R. F., & Chechter, L. A. S. (2012). Vote-Buying and Reciprocity. *Econometrica*, 80(2), 863–881. <https://doi.org/10.3982/ecta9035>
- Kennedy, J. J. (2010). The Price of Democracy: Vote Buying and Village Elections in China. *Asian Politics and Policy*, 2(4), 617–631. <https://doi.org/10.1111/j.1943-0787.2010.01215.x>
- Komito, L. (1992). Brokerage or friendship- Politics and Networks in Ireland. *Economic and Social Review*, 23(2), 129.
- Kosim, M. (2012). Kyai Dan Blater (Elite Lokal dalam Masyarakat Madura). *Karsa: The Journal of Social and Islamic Culture*, 12(2), 149–160. <https://doi.org/10.19105/karsa.v12i2.139>
- Larreguy, H., Marshall, J., & Querubín, P. (2016). Parties, brokers, and voter mobilization: How turnout buying depends upon the party’s capacity to monitor brokers. *American Political Science Review*, 110(1), 160–179. <https://doi.org/10.1017/S0003055415000593>
- Li, Y., Hou, J., Jiang, H., Wang, D., Fu, W., Yuan, Z., Chen, Y., & Zhou, L. (2007). Polymorphisms of CYP2C19 gene are associated with the efficacy of thalidomide-based regimens in multiple myeloma. *Haematologica*, 92(9), 1246–1249. <https://doi.org/10.3324/haematol.11319>
- Ravanilla, N., Haim, D., & Hicken, A. (2017). Brokers, Social Networks, Reciprocity, and Clientelism . *Aas*, 2017.
- Review, K., & Asia, S. (2009). *Social origin dan Politik Kuasa Blater di Madura Abdur Rozaki Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Institute for Research and Empowerment Yogyakarta*. 11(11), 1–12.
- Rijal, S. (2014). Peran Politik Kiai Dalam Dalam Pendidikan Pesantren. *Tadrîs Volume*, 9(2), 1–10.
- Rodrigo Zarazaga, S. J. (2014). Brokers Beyond Clientelism: A New Perspective Through the Argentine Case. *Latin American Politics and Society*, 56(3), 23–45. <https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2014.00238.x>

- Rozaky Abdur. (2004). *Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kyai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura*.
- Sahab, A., Alawy, K. H., & Ali, K. H. (2012). *Politik Patron-Client di Kabupaten Sampang*. 4, 1–7.
- Sholichin, M. M. (2012). Perilaku Politik Kiai Di Pamekasan. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 15(1), 35–43. <https://doi.org/10.19105/karsa.v15i1.112>
- Sofi'i. (2020). *Kepatuhan Masyarakat Pamekasan pada Kiai* [Personal communication].
- Steinthorsdottir, V., Thorleifsson, G., Reynisdottir, I., Benediktsson, R., Jonsdottir, T., Walters, G. B., Styrkarsdottir, U., Gretarsdottir, S., Emilsson, V., Ghosh, S., Baker, A., Snorraddottir, S., Bjarnason, H., Ng, M. C. Y., Hansen, T., Bagger, Y., Wilensky, R. L., Reilly, M. P., Adeyemo, A., Stefansson, K. (2007). A variant in CDKAL1 influences insulin response and risk of type 2 diabetes. *Nature Genetics*, 39(6), 770–775. <https://doi.org/10.1038/ng2043>
- Stokes, S. C., Dunning, T., Nazareno, M., & Brusco, V. (2013). Brokers, Voters, and Clientelism. *Brokers, Voters, and Clientelism*. <https://doi.org/10.1017/cbo9781107324909>
- Syarif, Z. (2016). Pergeseran Perilaku Politik Kiai dan Santri di Pamekasan Madura. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 16(2), 293. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i2.500>
- Taufiq. (2020). *Kepatuhan Masyarakat Pamekasan pada Kiai* [Personal communication].
- Tawakkal, G. T. I. (2017). Gapit: Jaringan Mobilisasi Suara di Pilkadaes. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8485>
- Tawakkal, G. T. I., & Garner, A. D. (2017). Unopposed but not uncontested: Brokers and “vote buying” in the 2017 Pati district election. *Contemporary Southeast Asia*, 39(3), 491–510. <https://doi.org/10.1355/cs39-3e>
- Towar, G., Tawakkal, I., Kistanto, N. H., Asy, H., Garner, A. D., Towar, G., Tawakkal, I., Kistanto, N. H., & Asy, H. (2017). Asian Affairs: An American Review Why Brokers Don't Betray: Social Status and Brokerage Activity in Central Java Why Brokers Don't Betray: Social Status. *Asian Affairs: An American Review*, 44(2), 52–68. <https://doi.org/10.1080/00927678.2017.1307641>
- Umar, M. H. (2018). Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni. *Al-Risalah*, 12(02), 1. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i02.448>
- Wati, A., Muadi, S., & Tawakkal, G. T. I. (2020). Hidup dalam Stigma: Kekerasan dan Religiuitas Bejingan. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(2), 109–202. <https://doi.org/10.31538/almada.v3i2.694>
- Zainuddin, S. (2014). Rekulturasi Pendidikan Islam. *Karsa*, 22(1), 23.
- Zamroni, I. (2012). Dinamika Elit Lokal Madura. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 17(1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v17i1.3744>



© 2021 by Asmawati Asmawati, Towar Ikbal Tawakkal, Sholih Muadi
This work is an open access article distributed under the terms and conditions of the
Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC BY SA)

*Asmawati Asmawati, Towar Ikkal Tawakkal, Sholih Muadi,
Religion, Political Contestation and Democracy: Kiai's Role as a Vote Broker in Madurese Local
Political Battles*